

KONFLIK SOSIAL ANTARA PEMERINTAH IRAN DENGAN KELOMPOK KONTRA KEBIJAKAN HIJAB DI NEGARA IRAN PADA PERIODE EBRAHIM RAISI

Luthfi Hakim^{1*}

¹ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*elhaloekim@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kata
Kunci:
Konflik
Sosial, Kebijakan
Hijab, Iran,
Politik Iran,
Ebrahim Raisi.

Penelitian ini membahas konflik sosial antara Pemerintah Iran dengan kelompok kontra kebijakan hijab pada periode kepemimpinan Presiden Ebrahim Raisi. Permasalahan yang dibahas dari penelitian ini adalah konflik apa saja yang terjadi akibat kebijakan hijab, dan bagaimana otoritas pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis konflik yang terjadi akibat kebijakan hijab dan menganalisis respons otoritas pemerintah dalam menangani konflik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis dokumentasi dengan teknik catat. Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai pedoman analisis untuk menjelaskan dinamika konflik dan kekuasaan antara kelompok yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan kebijakan hijab dan kelompok yang menginginkan perubahan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi akibat kebijakan hijab merupakan pertentangan yang dilakukan oleh kelompok kontra kebijakan hijab dengan tujuan untuk menuntut adanya perubahan dari kebijakan hijab. Selain itu hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa otoritas pemerintah yang menekan kelompok kontra bertujuan untuk mempertahankan Status Quo.



E-ISSN:

<https://journal.uns.ac.id/index.php/albuchuts>

This is an
open access
article under the
[CC BY-SA](#) license.



Copyright
© 2025 Authors
and Albuchuts

PENDAHULUAN

Hijab merupakan penutup tubuh bagian kepala terkhususnya rambut bagi Perempuan muslim, hijab juga menjadi mandat Islam yang paling terlihat. Selama satu abad, hijab telah menjadi tempat utama pertikaian ideologis antara tradisionalisme dan modernitas, dan tolok ukur untuk mengukur emansipasi atau penindasan Perempuan Muslim (Gilani, 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, hijab telah menjadi arena di mana retorika feminis Islamis dan sekuler telah bentrok. Bagi kaum Islamis, hijab mewakili identitas mereka yang berbeda dan klaim mereka terhadap keaslian agama, hijab juga merupakan sebagai mandat ilahi yang melindungi Perempuan dan menentukan tempat mereka dalam masyarakat. Bagi feminis sekuler, hijab mewakili penindasan Perempuan dimana hijab adalah mandat patriarki yang menolak hak Perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka dan memilih apa yang akan dikenakan (Gilani, 2019).

Di Iran Hijab bukan hanya melambangkan nilai ideologis tetapi hijab merupakan peraturan bernegara, karena hijab merupakan simbol kepatuhan terhadap perintah Tuhan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran. Hijab juga memainkan peran integral bagi perempuan karena melambangkan kebanggaan menjadi seorang perempuan Muslim, sumber peningkatan keimanan, mengikuti warisan dan budaya Iran, serta rasa kedekatan dengan sesama saudara perempuan Muslim Iran. Oleh karena itu semua perempuan Iran harus menjalani hidup mereka di bawah sistem berbasis gender patriarki yang sangat konservatif dengan penerapan Islam, dan Syariah dalam bentuknya yang paling otoriter dan reaksioner terhadap perempuan. Salah satu bentuk dari penerapan tersebut adalah kebijakan hijab di Iran (Gilani, 2019).

Mutahhari dalam (Ridgeon, 2021, p. 69) mengemukakan bahwa hijab adalah kewajiban (vājib) bagi perempuan dalam Islam. Hijab tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesalehan pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan moralitas publik. Kewajiban hijab adalah bagian integral dari ajaran Islam, yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kesopanan, mengurangi godaan dan hasrat serta melindungi perempuan dari objektifikasi dan eksploitasi, hal tersebut yang menjadikan hijab berkontribusi pada tatanan sosial dalam menjadikan ruang public yang stabil. Pemikirannya sejalan dengan pandangan tradisional hukum Islam yang mewajibkan perempuan untuk menutupi bagian tubuh tertentu sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat dan hukum tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

Berbeda dengan Mutahhari, Ahmad Qabil (Ridgeon, 2021, p. 127) memandang hijab sebagai hal yang dicintai (mustahabb) tetapi tidak wajib secara mutlak dalam konteks hukum Islam. Menurut Qabil, hijab dapat dilihat sebagai praktik yang terpuji untuk menjaga kesopanan, namun tidak harus diwajibkan secara paksa oleh negara atau otoritas agama. Ia menekankan bahwa pemakaian hijab seharusnya lebih didasarkan pada pilihan sukarela dari individu perempuan dan kesadaran pribadi tentang nilai-nilai moral Islam, bukan semata-mata kewajiban legal atau sosial, karena menurutnya paksaan atas pemakaian hijab tidak hanya mengingkari kebebasan individu tetapi juga bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang mementingkan kesadaran pribadi.

Pandangan hijab yang lebih progresif terdapat pada paparan Kadivar (Ridgeon, 2021, p. 203), yang berargumen bahwa hijab tidak wajib secara mutlak dalam konteks Islam modern. Kadivar menekankan bahwa pemakaian hijab tergantung pada waktu dan tempat, serta tidak harus dianggap sebagai kewajiban tetap bagi semua perempuan Muslim. Ia berpendapat bahwa hukum mengenai hijab merupakan hasil interpretasi manusia yang bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu dan situasi. Dalam pandangannya, interpretasi hukum Islam harus bersifat dinamis dan menyesuaikan diri dengan kondisi zaman modern. Kadivar juga menyoroti bahwa penerapan hijab harus dipertimbangkan berdasarkan perubahan sosial, budaya, dan konteks sejarah, sehingga tidak ada keharusan mutlak bagi semua perempuan di setiap waktu untuk mengenakannya.

Dalam sisi sejarah penerapan hijab sebagai peraturan bernegara di Iran terjadi setelah

Revolusi Iran yang merupakan sebuah keberhasilan rakyat Iran dalam menumbangkan kekuasaan Reza Shah Fahlevi dimana saat masa kepemimpinannya tidak ada kebijakan negara dalam mengatur pakaian perempuan, salah satunya hijab. Tumbangnya Reza Shah Fahlevi menghasilkan banyak perubahan dari segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat Iran, Ayatullah Uzhma Ruhullah Imam Khomeini sebagai pengganti Reza Shah Fahlevi adalah orang yang melakukan perubahan, salah satunya dengan kembali menghidupkan dan menyebarkan paham Syiah, sehingga mazhab Syiah menjadi basis utama negara Iran (Wijayanto & Ulinnuha, 2022).

Sebelum hijab diterapkan sebagai peraturan negara, Iran yang kala itu dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi tepatnya saat memasuki tahun 1920-an, perempuan Iran bahkan dilarang mengenakan hijab dan juga cadar, masyarakat Iran diharuskan berpakaian seperti orang Eropa. Pada tahun 1935 terbit aturan resmi untuk larangan berhijab bagi perempuan Iran. Sebelum revolusi, perempuan Iran dapat dikatakan memiliki kebebasan dalam berekspresi, bahkan mereka tidak segan untuk memakai busana yang cukup terbuka dengan warna-warna mencolok, mereka juga mengenakan riasan wajah dan gaya rambut seperti bintang Hollywood. Kebijakan larangan hijab yang dikeluarkan Pahlevi mendapatkan kecaman dari kalangan ulama Iran. Namun, Pahlevi membungkam para ulama dengan membuang mereka ke pengasingan. Berangkat dari sini, pergelakan di Iran pun terjadi yang akhirnya memicu lahirnya Revolusi Iran. Revolusi Iran merupakan reaksi dari kebijakan penguasa rezim Pahlevi yang diktator, dan sangat berorientasi pada negara-negara Barat. Selain itu, Pahlevi juga banyak membuat kebijakan yang memojokkan posisi ulama di Iran. Akibatnya, ulama perlahan-lahan menghimpun kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan perubahan. Tertanggal sejak 11 Februari 1979 menjadi momentum pengambilalihan kekuasaan oleh Ayatulloh Khamaeni dan kemudian mengubah sistem pemerintahan Iran (Wijayanto & Ulinnuha, 2022).

Sejarah terbentuknya kebijakan hijab tidak terlepas dari revolusi Iran, karena pasca Revolusi, Iran mengganti sistem pemerintahan negaranya dengan Republik Islam menggunakan sistem Waliyat al-Faqih sehingga di Negara ini ulama memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan negara. Kekuatan ulama di Iran tercipta karena negara ini memiliki sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem Waliyat al-Faqih sebagai landasan ideologis dalam bersosial dan juga bernegara. Sistem Waliyat al-Faqih menekankan kepemimpinan di bawah tangan para ulama, karena sistem ini merupakan sistem yang sama halnya dengan kehadiran wakil Tuhan, sehingga segala sesuatu yang datang dari ulama menjadi mutlak (Wijayanto & Ulinnuha, 2022).

Pada pembentukannya, kebijakan hijab terbentuk dengan sistem pemerintahan Waliyat al-Faqih Republik Islam Iran yang menjadi awal terbentuknya kebijakan tersebut, dimana sistem pemerintahan tersebut diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan Waliyat al-Amr, dan kepemimpinan agama. Dalam sistem ini, pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT dalam hirarki kekuasaan sistem Waliyat al-Faqih, sedangkan pemegang kekuasaan penuh dipegang oleh Imam Mahdi yang diyakini dalam masa ghaib kubra dan pelaksana tugas selama kegaiban Imam Mahdi adalah Wali Faqih. Struktur pemerintahan dalam Waliyat al-Faqih terlihat seperti memadukan konsep demokrasi modern ala barat dan sistem politik Imamah ala syiah imamiah. Hal ini terlihat pada konsep trias politika dalam pelaksanaan pemerintahan serta mengakomodir sistem demokrasi dengan pemilihan atau referendum (Wijayanto & Ulinnuha, 2022).

Kenyataan penggunaan sistem Waliyat al-Faqih dalam pemerintahan tak menjamin hak serta keadilan rakyat. Ulama yang ada justru tak terbuka pembaharuan. Hal ini terlihat dari peran ulama yang tafsirkan sepihak teks agama, termasuk soal peran wanita. Hal tersebut awal adanya ketimpangan wanita dan budaya patriarki yang tumbuh di masyarakat. Kemudian, hal itu diperkuat oleh posisi ulama sebagai aktor pembuat kebijakan, di mana ulama pria sangat mendominasi proses. Kebijakan yang coba diberlakukan para ulama, banyak yang koersif, intimidatif, diskriminatif pada wanita. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang mewajibkan wanita Iran berhijab (Wijayanto & Ulinnuha, 2022).

Kebijakan hijab lahir Pasca Revolusi Iran 1979, pada saat itu kebijakan hijab belum memiliki dasar hukum yang kuat hingga memasuki tahun 1983, Parlemen Iran menegaskan kepada perempuan Iran jika mereka tampil di muka umum tanpa hijab akan dihukum dengan 74 cambukan, dan pada tahun 1996 kebijakan tentang hijab tertulis di bab 18 pasal 638 KUHP Republik Islam Iran. Aturan tersebut tentunya mendapat kecaman dari kalangan perempuan Iran, bahkan tidak sedikit masyarakat Iran yang meninggalkan negara mereka karena tidak tahan hidup di bawah aturan Rezim Khamaeni (Wijayanto & Ulinnuha, 2022). Persoalan kebijakan hijab setelah kemenangan Khamaeni dalam Revolusi Iran menjadi salah satu tantangan paling kritis di Negara Republik Islam ini, terutama di kalangan pemuda, pelajar dan para elit masyarakat karena, perempuan Iran diwajibkan untuk menutupi sebagian besar tubuh mereka kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Bahkan perempuan Iran yang tidak berhijab dianggap sama seperti orang yang telanjang, hal tersebut membuat perubahan sosial yang cukup ekstrem karena menimbulkan konflik sosial antara perempuan Iran dan Pemerintah hingga saat ini, dan diyakini dapat menjadi konflik berkelanjutan di masa depan (Wijayanto & Ulinnuha, 2022).

Konsekuensi atas kebijakan hijab mulai menjadi masalah serius, hingga pada periode kepemimpinan Ebrahim Raisi tepatnya di tahun 2021, dimana pada periode itu Iran telah memiliki polisi moral yang mengatur dan menjaga kebijakan hijab. Persoalan hijab menjadi sangat panas, warga memadati jalan-jalan seantero Negeri Persia itu untuk memprotes kematian seorang wanita bernama Mahsa Amini. Kematian Mahsa Amini diduga terjadi pasca ditahan oleh Polisi Moral Iran akibat tidak mengenakan hijab pada 16 September 2022 lalu, kematian Mahsa Amini memicu serangkaian protes dan perlawanan besar yang berlangsung selama ratusan hari di berbagai penjuru Iran dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Iran menyatakan bahwa Mahsa Amini meninggal akibat serangan jantung, yang kemudian ditentang oleh keluarga bersangkutan karena ditemukan berbagai luka lebam di tubuh Mahsa Amini (Dhofir, 2023).

Menurut Palupi (Dhofir, 2023) Jika konflik hijab di negara Iran dikaji akan menghasilkan satu jawaban yang menjadi akar permasalahan, yaitu undang-undang yang mengatur kewajiban mengenakan hijab bagi wanita Iran, hingga munculnya Polisi Moral untuk menegakkannya. Implementasi penertiban peraturan kewajiban penggunaan hijab yang represif dan tidak berperikemanusiaan merupakan salah satu alasan yang memantik demonstrasi besar-besaran di Iran, khususnya setelah kematian Mahsa Amini akibat penertiban penggunaan hijab. Hak kebebasan perempuan menjadi tema utama yang diusung dalam demonstrasi tersebut dan merupakan momentum kebangkitan gerakan feminisme di Iran.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait objek material penulis yaitu Kebijakan Hijab di negara Iran dengan menggunakan teori konflik dan yang lainnya, maka penulis telah meninjau dan juga mengumpulkannya; dari setiap penelitian terdahulu yang penulis cantumkan di sini memuat perbedaan dan juga persamaan agar dapat membantu penulis untuk membuat nilai kebaruan dalam penelitian ini serta membantu memahami pengaruh terhadap perempuan di Iran, di antaranya penelitian pertama adalah skripsi oleh Mahadiva Edria Uqyana berjudul "Perkembangan Gerakan Feminisme Iran pada Masa Pemerintahan Hasan Rouhani (2013-2021)" yang membahas bagaimana perkembangan gerakan feminisme di Iran dalam membangun jaringan feminis yang mendorong penyelesaian isu diskriminasi perempuan, dengan perbedaan dari penelitian penulis adalah teori, objek, dan tahun yang diteliti. Penelitian yang kedua adalah skripsi oleh Mughiz Sarda Novianto berjudul "Pengaruh Kesepakatan Ta'if Terhadap Politik Konfesionalisme Lebanon" yang mengkaji tentang pengaruh kesepakatan Ta'if terhadap politik Konfesionalisme di Lebanon menggunakan Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf dan Teori Elit Politik secara umum, dengan perbedaan dari penelitian penulis adalah objek, dan fokus yang diteliti. Penelitian ketiga adalah jurnal ilmiah karya Nabilah Wafa Wijayanto dan Roma Ulinnuha berjudul "Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab Era Hassan Rouhani" di mana dijelaskan tentang resistensi

perempuan serta perlawanan dan konflik yang terjadi karena kebijakan hijab di Iran menggunakan perspektif Feminisme Fatima Mernissi. Penelitian keempat adalah jurnal ilmiah karya Mas Odi, dan Fandi Ahmad berjudul “Mahsa Amini, Hijab, and Mass Movements: Reading the Iranian Constitution About Women in Public Spaces” di mana dijelaskan tentang gerakan massa di Iran, kewajiban jilbab dan dampaknya terhadap karir perempuan Iran, dan konstitusi Iran yang mengatur perempuan di ruang publik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. (Zuldaifal, 2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak didasarkan atas analisis statistik, data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa kata-kata lisan, tulisan, serta perilaku subjek yang diamati dan pengumpulan datanya sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti. Teknik penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013: 240).

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teori, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan dan juga dunia penelitian khususnya pada pengetahuan tentang konflik sosial antara Pemerintah Iran dengan kelompok kontra kebijakan hijab di negara Iran pada periode Ebrahim Raisi. Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para pembaca dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu menjadi acuan untuk pengembangan ilmu selanjutnya. Khusus bagi para pembaca orang Indonesia, penelitian ini bisa memberikan informasi terkait konflik kebijakan penggunaan hijab yang diterapkan di Iran dengan melihat makna sejarah, efektifitas dan fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Yang Terjadi Akibat Kebijakan Hijab

1. Resistensi Simbolik Perempuan

Resistensi simbolik adalah penggunaan simbol-simbol yang berlandaskan teologis untuk menentang ketidakadilan dan menyerukan keadilan, dan dapat dimanfaatkan secara menguntungkan dalam perlawanan terhadap struktur dan ideologi yang menindas (Birkler, 2023). Berkaitan dengan konflik yang terjadi akibat kebijakan hijab di Iran pada periode Ebrahim Raisi banyak perempuan di Iran melawan kebijakan hijab dengan cara simbolis, seperti pembakaran hijab, melepas hijab di ruang publik dan memposting video di media sosial. Aksi ini menjadi simbol perlawanan perempuan terhadap penindasan dan inspirasi bagi gerakan feminis di seluruh dunia dan diharapkan resistensi ini menarik perhatian global, dengan banyaknya dukungan dari komunitas internasional dan dalam negeri.

Fenomena resistensi simbolik perempuan di Iran pada era Ebrahim Raisi menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan hijab represif, yang melampaui protes fisik. Aksi-aksi simbolis seperti melepas atau membakar hijab, gerakan *Women Life Freedom*, serta penggunaan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan, menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan tuntutan kebebasan individual. Perlawanan ini didukung berbagai kalangan, termasuk seniman, atlet, dan musisi seperti Hengameh Ghaziani, Katayoun Riahi, dan Mehdi Yarrahi. Bahkan Tim Nasional Sepak Bola Iran turut memprotes dengan menolak menyanyikan lagu kebangsaan. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan gerakan resistensi simbolik, seperti kampanye #HairForFreedom yang menginspirasi solidaritas global. Aksi ini tidak hanya menentang kebijakan, tetapi juga mengekspresikan hak perempuan atas kebebasan dan kritik terhadap struktur kekuasaan otoriter, mencerminkan semangat perubahan yang mendalam baik di Iran maupun di tingkat global.

2. Demonstrasi Kontra Kebijakan Hijab

Demonstrasi adalah aksi sekelompok orang yang secara kolektif menunjukkan dukungan atau protes untuk menyatakan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan, penyampaian didepan umum untuk mengungkapkan pendapat kelompok atau menolak kebijakan yang diterapkan oleh pihak tertentu (Taufiq & Lubis, 2022, p. 258). Demonstrasi memiliki kaitan erat dengan kebijakan hijab di Iran, dengan lahirnya kebijakan hijab setelah revolusi Iran pada tahun 1979 menjadikan demonstrasi sebagai salah satu fenomena perjuangan kelompok kontra pemerintah yang tidak sepuas dengan jalannya kebijakan hijab. Penulis membagi sub bab demonstrasi ini menjadi 3 fase, yaitu fase awal, fase pertengahan, dan fase akhir.

a. Fase Awal.

Pada fase awal penulis menandai dengan awal mula kepemimpinan Ebrahim Raisi sebagai presiden, demonstrasi pada awal kepemimpinan terjadi dua kali. Menurut laporan U.S Department of State (2021) kelompok kontra kebijakan hijab memiliki ketakutan untuk melakukan perlawanan berupa demonstrasi. Pemerintah Iran secara konsisten menindak protes dengan keras, termasuk melalui penangkapan, pemenjaraan, dan kekerasan fisik. Penulis membagi waktu fase awal terjadi sejak 3 Agustus 2021 hingga 15 September 2022 dengan dasar keunikan pada fase ini berupa ketakutan untuk menyuarakan perlawanan dengan demonstrasi, dan jika terjadi demonstrasi hanya dengan waktu singkat serta frekuensi yang kecil. Waktu yang singkat dan frekuensi yang kecil ini disebabkan oleh kuatnya otoritas Pemerintah Iran.

b. Fase pertengahan

Fase pertengahan adalah fase titik balik demonstrasi terkait kebijakan hijab yang meledak setelah tragedi meninggalnya Mahsa Amini pada 16 September 2022 (Rony, 2022). Menurut Motamedi (2023) demonstrasi setelah meninggalnya amini menjadi titik balik bersatunya perempuan yang kontra dengan kebijakan dan mengalami lonjakan yang pesat disetiap penjuru Iran. Perempuan kontra kebijakan hijab mulai bersatu memadati jalan jalan untuk menuntut hak hak perempuan dalam kebebasan berpakaian.

c. Fase Akhir

Fase akhir demonstrasi kebijakan hijab di periode ebrahim raisi diawali penulis pada awal 2023 tepatnya setelah fenomena demonstrasi besar yang terjadi di seluruh penjuru Iran karena tragedi Amini hingga 25 Mei 202 yang ditandai meninggalnya presiden Ebrahim Raisi karena Kecelakaan helikopter. Fase akhir ini merupakan pembagian demonstrasi yang sudah memiliki gaya baru dan berbeda dengan fase awal yang belum aktif karena otoritas pemerintah yang sangat kuat serta ketakutan kelompok kontra kebijakan hijab pada hukuman yang diterapkan, dan berbeda dengan fase pertengahan yang pada saat itu hanya menjadi titik balik perlawanan. Menurut Ziabari (2023) setelah fenomena tragedi Amini, demonstrasi terkait kebijakan hijab memiliki perbedaan dengan sebelum adanya fenomena itu. Demonstrasi fase akhir terdapat empat hal unik yang menjadikannya gaya baru dalam demonstrasi kebijakan hijab. Keunikannya adalah Tuntutan akan kebebasan sipil yang lebih besar, Demografi para pengunjuk rasa jauh lebih beragam, Sebaran geografis yang luas, Frekuensi, Durasi, dan Skala Demonstrasi yang besar

3. Konflik Sosial antara Kelompok Konservatif dan Kontra Kebijakan

Konflik sosial adalah perselisihan antar anggota atau kelompok yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan (KBBI, 2025). Konflik sosial juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan yang dikuasai (Dahrendorf, 1986). Pada sub bab ini penulis menjadikan kelompok konservatif sebagai pendukung pemerintah terkait kebijakan hijab dengan kepentingan mempertahankan status quo yang berkonflik dengan kelompok kontra kebijakan sebagai kelompok yang menginginkan perubahan.

Pada periode Ebrahim Raisi kebijakan hijab di Iran telah menciptakan polarisasi dan konflik sosial antara kelompok konservatif yang mendukung dan kelompok kontra kebijakan yang menentang. Kelompok kontra, yang terdiri dari aktivis, akademisi, dan generasi muda, melihat kebijakan ini sebagai penindasan hak asasi, sedangkan kelompok konservatif, yang sebagian besar adalah ulama dan pendukung pemerintah, menganggap hijab sebagai simbol moralitas dan identitas nasional. Konflik ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyerangan terhadap perempuan yang tidak berhijab di tempat umum, pelemparan sorban ulama, dan penolakan layanan di toko-toko. Konflik ini mencerminkan pergeseran sosial di Iran, di mana keberanian untuk menantang otoritas meningkat, menunjukkan ketidakpuasan yang berkembang terhadap aturan negara dan berpotensi membawa perubahan sosial dan politik yang lebih besar di masa depan.

B. Otoritas Pemerintah Dalam Menangani Konflik Yang Terjadi

1. Penguatan Kebijakan Hijab

Menurut Dahrendorf (1986) penguatan kebijakan merupakan cara kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mengelola konflik untuk kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mempertahankan status quo. Ketika kebijakan dipengaruhi oleh kekuasaan yang lebih dominan menjadikan penguatan kebijakan tersebut menjadi peningkatan kontrol atau regulasi terhadap kelompok lemah yang menginginkan perubahan.

Selama periode kepemimpinan Ebrahim Raisi, pemerintah Iran memperkuat kebijakan hijab melalui berbagai cara, termasuk dikeluarkannya dekret presiden yang lebih membatasi cara berpakaian perempuan dengan mewajibkan cadar, pakaian longgar, dan hijab yang menutupi seluruh rambut, leher, dan bahu, sehingga terdapat larangan penggunaan fasilitas umum bagi perempuan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Pembatasan juga diperluas ke lingkup universitas, media sosial, dan pengguna mobil pribadi. Bisnis juga diancam ditutup jika melayani perempuan yang tidak berhijab, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan dibatasi bagi mereka yang tidak patuh.

Pemerintah juga mencegah peringatan kematian Mahsa Amini, yang memicu protes terkait hijab. Puncak penguatan terjadi ketika pemerintah memperbarui undang-undang kebijakan hijab dengan menambahkan pasal-pasal baru yang mendefinisikan secara rinci pelanggaran hijab seperti pakaian ketat, tidak berhijab, serta promosi ketelanjangan. Pembaruan juga meliputi peningkatan hukuman secara signifikan, termasuk denda yang lebih besar, hukuman penjara yang lebih lama, larangan bepergian, pembatasan aktivitas daring, dan penyitaan aset bagi pelanggar, terutama bagi figur publik. Undang-undang baru ini juga mewajibkan platform media sosial untuk memantau dan menghapus konten yang dianggap melanggar.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penindakan pada Penerapan Kebijakan Hijab

Menurut Dahrendorf (1986) peningkatan pengawasan dan penindakan dalam penerapan sebuah kebijakan adalah bentuk dominasi dari sebuah otoritas. Pada penerapannya peningkatan pengawasan dan penindakan pada sebuah kebijakan terjadi karena kelompok yang memiliki kepentingan merasa status quo sedang terancam. Peningkatan ini digunakan kelompok berkepentingan untuk menekan kelompok yang menginginkan perubahan sehingga kelompok yang memiliki kepentingan dapat mempertahankan status quo.

Pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi, pengawasan dan penindakan terhadap kebijakan hijab di Iran diperketat secara signifikan, atas perintah langsung Presiden Raisi yang menganggap kepatuhan terhadap aturan hijab menurun. Peningkatan ini meliputi:

- penambahan tujuan pengawasan, seperti perluasan area pengawasan ke universitas dan tempat bisnis, yang sebelumnya hanya di jalan utama.
- penggunaan teknologi kamera pengawas di stasiun kereta bawah tanah, jalan raya, dan

tempat umum, serta pengiriman pesan teks peringatan kepada pelanggar.

- pengawasan media sosial untuk mencegah unggahan foto atau video tanpa hijab dan hasutan negatif.
- pemberian kelas pengarahan bagi pelanggar sebagai alternatif hukuman denda.
- penangkapan figur publik yang menentang kebijakan hijab secara terbuka.
- penindakan dengan kekerasan fisik oleh polisi moral terhadap mahasiswa dan demonstran seperti penggunaan gas air mata, peluru karet, pemukulan.
- penangkapan massal demonstran sebagai respons terhadap protes kematian Mahsa Amini. Peningkatan-peningkatan ini merupakan hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan kontrol dan menekan kelompok kontra kebijakan hijab yang semakin berani.

3. Pembatasan Informasi terkait konflik hijab

Pada periode Ebrahim Raisi Pemerintah Iran merespons konflik yang disebabkan oleh kebijakan hijab dengan berbagai cara, salah satunya adalah pembatasan informasi terkait tentang konflik hijab untuk menghentikan demonstrasi, dan mencegah gelombang demonstrasi yang lebih besar muncul dimasa yang akan datang. Pembatasan informasi ini juga merupakan bentuk kontrol pemerintah untuk menekan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kesamaan visi terkait hijab dan sebagai bukti bahwa otoritas pemerintahan di Iran masih memiliki kewenangan yang tinggi (Hussain & Biddle, 2022). Pembatasan yang dilakukan pemerintah yaitu :

- pemadaman listrik di kota-kota pusat demonstrasi untuk memutus koneksi internet dan mencegah penyebaran informasi.
- pembatasan akses internet, termasuk pelemahan konektivitas jaringan dari 4G ke 2G dan pemblokiran aplikasi media sosial secara berkala seperti WhatsApp dan aplikasi Meta lainnya.

pembatasan pers, termasuk intimidasi dan penangkapan jurnalis yang meliput atau mengunggah berita tentang konflik hijab, yang menyebabkan banyak jurnalis menggunakan nama samaran. Pembatasan-pembatasan ini merupakan upaya baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan bagaimana pemerintah Iran berusaha mengontrol narasi dan menekan kelompok-kelompok yang menentang kebijakan hijab.

KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif teori Ralf Dahrendorf, penelitian yang dilakukan penulis dengan judul konflik sosial antara Pemerintah Iran dengan kelompok kontra kebijakan hijab di negara Iran pada periode Ebrahim Raisi terdapat kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Konflik yang terjadi karena kebijakan hijab di Iran di kategorikan menjadi 3 yaitu : Resistensi Simbolik Perempuan, Demonstrasi Kontra Kebijakan Hijab, dan Konflik antara Kelompok Konservatif dan Kontra Kebijakan. Konflik yang terjadi didasari oleh kelompok kontra kebijakan yang menginginkan perubahan dari kebijakan hijab karena menganggap kebijakan hijab merupakan sebuah diskriminasi, dan meyakini bahwa semua perempuan berhak menentukan penggunaan busana serta pakaiannya sendiri dengan bebas tanpa perlu diatur oleh negara.
2. Otoritas Pemerintah Iran dalam merespons konflik yang timbul akibat kebijakan disimpulkan dengan berbagai tindakan yang semakin memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap perempuan,. Tindakan tersebut adalah Penguatan Kebijakan Hijab, Peningkatan Pengawasan dan Penindakan pada Penerapan Hijab, dan Pembatasan Informasi Terkait Konflik Hijab.

Kontrol yang semakin diperkuat ini merupakan bentuk pencegahan perubahan dan upaya pemerintah dalam mempertahankan status quo, dalam hal ini pemerintah Iran yang tidak ingin kehilangan status quo dan demi menjaga marwah pemerintahan, pemerintah Iran menggunakan sistem otoriter yang anti dengan oposisi terkait kebijakan hijab di negara Iran.

DAFTAR PUSTAKA

- Birkler, M. K. (2023). Symbolic Theology and Resistance in the Theology of Martin Luther King, Jr. and Paul Tillich. *Open Theology*, 9.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali.
- Dhofir, M. B. (2023). *Iran Bersuara: Gelombang Feminisme dan Seruan Keadilan Tuntut Hak Asasi Manusia Pasca Kematian Mahsa Amini*. Semarang: LPM OPINI ONLINE.
- Gilani, S. (2019, March). *Article*. Retrieved from Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/331802242_Rhetoric_and_Communication_Research_Paper_Hijab_A_Tool_of_Women_Oppression_in_Iran_Is_hijab_used_as_a_tool_for_women_oppression_in_Iran
- Hussain, M., & Biddle, S. (2022, Oktober 28). *Hacked Documents: How Iran Can Track and Control Protesters' Phones*. Retrieved from The Intercept: <https://theintercept.com/2022/10/28/iran-protests-phone-surveillance/>
- KBBI. (2025, February 2). *Konflik Sosial*. Retrieved from Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik%20sosial>
- Motamedi, M. (2023, September 16). *Iran: One year after the death of Mahsa Amini*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/16/iran-one-year-after-the-death-of-mahsa-amini>
- Rony, T. K. (2022, September 23). *Kronologi Kasus Mahsa Amini: Hijab, Polisi Moral, hingga Demo Besar*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/5078496/kronologi-kasus-mahsa-amini-hijab-polisi-moral-hingga-demo-besar>
- Taufiq, R., & Lubis, B. S. (2022). *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: UMSU Press.
- U.S Department of State. (2021). *2021 Report on International Religious Freedom: Iran*. Washington, D.C: official website of the United States Government.
- Wijayanto, N. W., & Ulinuha, R. (2022). RESISTENSI PEREMPUAN IRAN TERHADAP KEBIJAKAN WAJIB BERHIJAB PADA ERA HASSAN ROUHANI. *UIN SUKA REPOSITORY*, 171-186.
- Ziabari, K. (2023, September 6). *Female Protests in Iran: One Year Later*. Retrieved from The Iran Primer, United States Institute Peace: <https://iranprimer.usip.org/blog/2023/sep/06/protests-anniversary-one-year-later>